



IKATAN SOSIOLOGI INDONESIA



20 REFORMASI TAHUN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI

[1 9 9 8 - 2 0 1 8]

POTRET KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, PROVINSI LAMPUNG

IKRAM DAN USMAN RAIDAR

Dosen Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Lampung

Jln. Sumantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung 35145

Correspondence: HP 081379629554; e-mail: ikram_badila@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mendapatkan gambaran mengenai anatomi konflik, dan pola persebaran konflik berdasarkan wilayah, dampak konflik, dan langkah-langkah penanganan pascakonflik dalam rangka pembangunan infrastruktur. Penelitian dilakukan di Kecamatan Way Panji, Natar, Jati Agung, dan Tanjung Sari dengan pertimbangan konflik yang pernah terjadi sudah terselesaikan namun masih diingat hingga saat ini serta rentan terjadi konflik kembali (rawan konflik), di samping itu masing-masing kecamatan memiliki klasifikasi konflik yang berbeda (etnis, agama/keyakinan, pemerintah, perusahaan, dan dampak pembangunan infrastruktur). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan disebabkan oleh kebijakan pembangunan dan implementasinya yang mengabaikan keberadaan dan kepentingan masyarakat lokal yang majemuk. Mekanisme penanganan konflik kurang melihat faktor-faktor penyebab secara mendasar sehingga dapat menyebabkan timbulnya konflik sosial secara berkelanjutan. Konflik potensial dan konflik terbuka terjadi paling tidak bersumber dari empat faktor, yaitu berbasis pada hubungan psikososial, kepentingannya ekonomi, perbedaan nilai-nilai (agama, kepercayaan, etnisitas), dan struktural. Faktor pemicu konflik sosial bervariasi, dari sisi perilaku aktor, berawal dari konflik antar individu atau antar kelompok kecil, kemudian berkembang menjadi konflik antar kelompok yang lebih besar. Sedangkan dari kualitas persoalan yang dihadapi, konflik antar kelompok dapat dipicu dari persoalan yang sederhana, tidak realistis dan tidak menarik, sampai pada persoalan yang realistis dan mendasar. Penanganan konflik sosial mengedepankan asas musyawarah dan mufakat, melalui mediasi. Penanganan lebih terkonsentrasi pada upaya penyelesaian konflik terbuka.

A. LATAR BELAKANG

Lampung merupakan salah satu wilayah yang masyarakatnya majemuk karena adanya arus migrasi penduduk melalui program kolonisasi, transmigrasi, dan migrasi swakarsa. Kemajemukan tersebut merupakan modal pembangunan namun juga berpotensi menimbulkan konflik sosial. Lampung menjadi sorotan karena beberapa peristiwa konflik sosial.

Pemetaan konflik berdasar dimensi sebab berbasis wilayah telah memberikan informasi awal betapa intensitas konflik sosial di Lampung cukup tinggi. Oleh karena itu, perlu ditindaklanjuti dengan pemetaan konflik berdasar dimensi lain. Pemetaan konflik pada level mikro untuk kecamatan Way Panji, Natar, Jati Agung, dan Tanjung Sari di Lampung Selatan berdasarkan dimensi aktor (pelaku/stakeholder), dimensi dinamika (ekskalasi, intensitas, bentuk, dan pola), dimensi akibat (konstruktif/positif atau destruktif/negatif), dan dimensi resolusi (musyawarah, negosiasi, mediasi, arbitrase, dan adjudikasi) dapat dijadikan pelengkap.

Dengan adanya peta konflik dengan berbagai dimensinya tersebut, dapat menjadi bahan masukan penanganan pascakonflik dari sisi infrastruktur, yakni (1) menjadi sumber informasi tentang peta kondisi wilayah kecamatan dan desa yang rawan konflik sosial, (2) menjadi perbendaharaan pengetahuan tentang anatomi konflik dan penanganan pasca konflik sosial di beberapa wilayah kecamatan dan desa di dalam suatu wilayah kabupaten, dan (3) menjadi dasar pertimbangan sosial, ekonomi dan lingkungan yang kuat dalam membuat formulasi kebijakan dan program kegiatan terkait dengan strategi untuk mengatasi berbagai kendala sosial dalam pembangunan infrastruktur di daerah-daerah rawan konflik.

B. BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan gabungan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Model kombinasi dua pendekatan dengan salah satu pendekatan yang dominan ini secara metodologis merujuk pada model yang disebut Creswell (1994) sebagai *dominant-less dominant design of mixed-methodology*.

Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui studi dokumentasi dan pengamatan untuk memperoleh data agregat mengenai kejadian dan dampak/kerugian yang memiliki sumber pembuktian dan pengalaman serta jenis interaksi sosial di lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya, pendekatan kualitatif melalui kelompok diskusi terarah dan wawancara mendalam untuk penajaman dan pendalaman informasi yang didapat dari hasil pendekatan kuantitatif.

1. Pemilihan Lokasi Penelitian

Dipilihnya Kecamatan Way Panji, Natar, Jati Agung, dan Tanjung Sari sebagai lokasi penelitian dikarenakan konflik yang terjadi meskipun sudah terselesaikan namun masih diingat hingga saat ini sehingga rentan terjadi konflik (rawan konflik), di samping itu masing-masing kecamatan memiliki klasifikasi konflik yang berbeda (etnis, agama/keyakinan, pemerintah, perusahaan, dan dampak pembangunan infrastruktur).

2. Metode Pengumpulan Data

Metode studi dokumentasi, wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, pengamatan, dan seminar digunakan untuk memperoleh data. Data dibedakan atas dua jenis, yang pertama adalah data primer yang didapat melalui penelitian lapangan - baik melalui metode studi dokumentasi, wawancara mendalam, *Focus Group Discussion/FGD*, maupun pengamatan langsung - dan data sekunder didapat melalui studi dokumentasi - seperti artikel, kliping, buku, jurnal, dokumen lainnya - dan melalui seminar.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

1. Peta Konflik Kecamatan Way Panji

Kecamatan Way Panji memiliki 4 Desa yang dihuni oleh berbagai kelompok etnis/suku. Konflik sosial yang terjadi pada tanggal 27-29 Oktober 2012 sering disebut dengan “Konflik Balinuraga atau konflik Way Panji”, terjadi di desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji. Konflik ini bernuansa etnik (dan agama), karena isu yang berkembang membias, antara kelompok etnik Bali dengan kelompok etnik Lampung.

1.1 Anatomi konflik dan eskalasi konflik

Konflik bermula karena pelecehan seksual oleh pemuda desa Balinuraga kepada etnis Lampung. Dialog antara kedua pihak berkonflik tidak berhasil, dan karena adanya berbagai latar belakang masalah mendasar lainnya membuat kegeraman dan keresahan yang telah ada dalam jangka waktu cukup lama, terjadi penyerangan massa etnis Lampung yang berasal dari berbagai wilayah ke desa Balinuraga

1.2 Hubungan antar aktor dan akibat konflik

Pada puncaknya, konflik ini tidak hanya melibatkan dua pihak saja namun melibatkan etnis Lampung lain dari berbagai daerah seperti Jabung, Asahan, Lampung Tengah, Metro, Lampung Utara, dan etnis Lampung dari Provinsi Banten. Selain itu, ada beberapa etnis lain (terutama etnis Jawa dan Semendo) yang juga turut serta membantu orang Lampung. Hal ini terjadi karena akumulasi kekesalan etnik pendatang yang merasa pernah berseteru dengan orang Bali.

Konflik mengakibatkan sebuah gedung SMP rusak 40%; sebuah gedung SD rusak 20%; tempat ibadah berupa Pura 1 buah rusak parah; rumah warga berjumlah 375 rumah beserta pura; korban meninggal 9 orang dan puluhan orang Bali luka-luka, dan 4 orang Lampung.

1.3 Penyelesaian konflik

Dua tahapan penyelesaian konflik, pertama, perdamaian dilakukan di Balai Keraton Bandar Lampung pada Minggu, 4 November 2012. Dihadiri oleh tokoh adat Lampung dan Bali serta pemerintah Lampung Selatan. Kedua, 21 Nopember 2012 dilaksanakan acara deklarasi perdamaian di lapangan Waringin Harjo, Desa Agom, Kecamatan Kalianda. Dihadiri warga Lampung dari Desa Agom Kecamatan Kalianda, warga Bali dari Desa Balinuraga, Pemerintah

Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, aparat keamanan, Polri dan TNI.

1.4 Penanganan pasca konflik

Penanganan pasca konflik dilakukan berbagai upaya perbaikan dalam aspek fisik dan sosiokultural, baik dari dalam masyarakat sendiri maupun dari luar. Upaya penanganan dari luar berupa program pemberdayaan dan program intervensi guna memulihkan kondisi harmonis hubungan ke dalam dan hubungan antar pihak berkonflik.

- a. **Perbaikan bangunan**, Desa Agom mendapatkan bantuan perbaikan ratusan rumah. Balinuraga memperbaiki rumah, sekolah, pure, gapura di desa Balinuraga yang rusak.
- b. **Penguatan peran kelembagaan**, Lembaga adat Lampung diperkuat dan peran para tokoh adat (Lima Marga) difungsikan. Tokoh etnis Bali semakin diperankan secara positif. Lembaga Banjar diintensifkan terutama dalam membina moral anak muda. Selain itu, di antara para tokoh masyarakat menjalin silaturahmi lebih intensif, melakukan komunikasi untuk memperkuat jejaring sosial yang terganggu akibat konflik.
- c. **Pengembangan kesenian tradisional kolaboratif**, di bidang kesenian tradisional, berhasil dikembangkan suatu tarian baru yang merupakan kolaborasi antara tari Lampung dan tari Bali. Tarian ini telah ditampilkan dalam acara pentas seni di Kecamatan Way Panji.
- d. **Pengembangan sistem jejaring (sistem koordinasi)**, memperkuat deteksi dini masyarakat pada level desa, sebagai bentuk implementasi dari “rembuk pekon” yang telah dicanangkan oleh Polda Lampung, pada tataran operasional melalui personilnya dilakukan penguatan sistem koordinasi dan sistem pengendalian sosial bersama masyarakat pada tingkat desa.

1.5 Harapan masyarakat dalam memperkuat perdamaian

Memperkuat perdamaian dibangun melalui tindakan-tindakan, baik yang merupakan inisiatif masyarakat maupun fasilitasi pemerintah daerah dengan cara (1) menjalin silaturahmi antar individu warga, terutama dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, (2) menghilangkan beban psikhis, dengan memperkuat sistem keamanan sosial dan lingkungan untuk menjaga agar tidak muncul fitnah pada kelompok etnik tertentu, pada setiap terjadi kasus konflik yang kecil, (3) pembinaan generasi muda dalam aspek fisik, mental dan moralnya, dengan mengaktifkan kelompok-kelompok/organisasi kepemudaan, dan (4) meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pembangunan sistem irigasi teknis di lahan pertanian.

2. Peta Konflik Kecamatan Natar

Konflik sosial terjadi di Kecamatan Natar, antar kelompok sesama pemeluk agama Islam, tetapi di antara mereka memiliki keyakinan nilai-nilai tertentu yang berbeda secara diametral, yang tidak bisa dikompromikan.

2.1 Anatomi konflik dan faktor penyebab

Konflik yang terjadi di Kecamatan Natar adalah konflik sosial bernuansa agama, antara kelompok jamaah LDII dan kelompok jamaah non-LDII. Konflik terjadi antara tahun 2004 sampai dengan 2011 dengan tanda-tanda yang telah muncul sejak tahun 1998. Bentrok fisik terjadi pada tanggal 8 September 2004. Pelaku konfliknya adalah Pihak I kelompok jamaah LDII, sedangkan Pihak II adalah jamaah Non-LDII.

Penyebab langsung konflik adalah rencana perluasan pembangunan Masjid jamaah LDII yang ditolak oleh warga non LDII dengan cara merobohkan masjid. Konflik yang telah bermula sejak 1998 ini terakumulasi karena tidak ada penyelesaian dan karena kelemahan sistem koordinasi antar stakeholder, termasuk para tokoh masyarakat setempat dalam berkomunikasi dan berkoordinasi untuk menyelesaikan konflik sosial antara kelompok beragama.

2.2 Dampak konflik dan penanganan pasca konflik

Dampak dari konflik ini secara fisik adalah robohnya masjid LDII, korban 1 orang meninggal dan 13 orang luka-luka. Selain itu juga terjadi hubungan sosial antar warga masyarakat pada dua kelompok beragama menjadi retak atau renggang.

Penanganan pasca konflik dilakukan melalui mediasi oleh pemerintah, koordinasi antar para pihak. Mediasi mengakibatkan jamaah LDII semakin terbuka. Kondisi pasca konflik, yaitu: (1) masjid LDII dapat dibangun secara damai; (2) toleransi beragama di antara warga masyarakat semakin berkembang; (3) komunikasi dan kerjasama lintas (antar) agama semakin efektif, seperti melalui kegiatan rukun kematian, olah raga bersama, dll).

3. Peta Konflik Kecamatan Jati Agung

Konflik di Kecamatan Jati Agung ini merupakan konflik agraria, terkait dengan perebutan penguasaan atas tanah pertanian, antara warga masyarakat sekitar dengan pemerintah Provinsi Lampung.

3.1 Kronologi kejadian

Pada tahun 1999 masyarakat mengambil alih lahan pengelolaan LIPI dan menggunakannya sebagai lahan garapan. Kemudian, pada tahun 2007 Pemerintah (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung) meluncurkan Program Gerhan (Gerakan Penghijauan Lingkungan) di atas lahan eks LIPI dan Bappeda. Masyarakat menerima program Gerhan. Tahun 2010 – 2012, Pemerintah memindahkan rencana pembangunan “Kota Baru” dari Natar ke Jati Agung ke atas lahan eks LIPI yang menjadi program gerham. Pindahan ini ditolak oleh masyarakat melalui GPL. Demonstrasi dan lobi dilakukan, mengakibatkan dinaikannya uang “tali asih” dari Rp. 2.000.000. per hektar menjadi Rp. 5.000.000. per hektar. Tahun 2013, Pemerintah Provinsi menganggap masalah tanah eks LIPI sudah selesai, meskipun masyarakat menganggapnya belum selesai.

3.2 Anatomi konflik dan pelaku

Konflik terjadi karena pengambil-alihan tanah eks LIPI oleh Pemerintah Provinsi Lampung dari masyarakat penggarap yang berjumlah 1.300 keluarga. Tanah eks LIPI merupakan bagian dari kawasan Register 40. Pengambil-alihan tanah eks LIPI yang selama ini digarap masyarakat terkait dengan rencana pembangunan “Kota Baru Lampung” oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Konflik terjadi pada tahun 2010-2012 di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, dalam bentuk perebutan hak pakai atas tanah eks LIPI yang berada di atas lahan Register 40 Gedung Wani.

Pihak pertama adalah masyarakat penggarap tanah eks LIPI yang membentuk organisasi Gabungan Petani Lampung (GPL). Pihak kedua adalah Pemerintah Provinsi Lampung, didukung oleh Kementerian Kehutanan, Pemerintah Kecamatan Jati Agung, TNI dan POLRI.

3.3 Penyebab konflik dan dampak

Penyebab langsung konflik ini adalah pengambil alihan lahan eks LIPI oleh pemerintah Lampung. Sedangkan penyebab tidak langsungnya adalah (1) kebijakan pemerintah yang tidak konsisten yang ditunjukkan dengan berganti-gantinya kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang terjadi sejak tahun 1970an. Tidak adanya penjelasan dari pemerintah tentang status program pengambil alihan lahan ini, dan (2) pendekatan kekuasaan yang dipakai oleh Pemerintah Provinsi Lampung pada saat pengambil-alihan lahan. Minimnya komunikasi dan dialog antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan masyarakat penggarap.

Dampak langsung atas kejadian konflik adalah (1) hilangnya sumber penghidupan masyarakat penggarap (1300 keluarga), (2) renggangnya hubungan masyarakat dengan pamong Desa karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap efektivitas peran pamong (pemerintah)

sebagai pengayom (pamong) masyarakat yang berakibat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pamong menurun, dan (3) meningkatnya angka kriminalitas di desa sekitar Kota Baru.

3.4 Penyelesaian konflik dan penanganan pasca konflik

Dilakukan pemberian uang ganti rugi (uang tali asih) yang semula sebesar Rp. 2.000.000 menjadi sebesar Rp. 5.000.000 per hektar. Sedangkan penyelesaian yang diharapkan oleh penggarap adalah relokasi lahan atau memindahkan para penggarap ke area lain, yang masih berada di wilayah Provinsi Lampung, dengan luasan yang layak untuk menopang penghidupannya.

Penanganan pasca konflik yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung yakni (1) pemberitahuan secara lisan oleh pemerintah untuk memanfaatkan lahan yang belum dimanfaatkan untuk membangun Kota Baru namun pihak pelaksana proyek Kota Baru mengusir tanaman masyarakat yang memanfaatkan lahan, dan (2) pemerintah memberikan kesempatan masyarakat untuk menggarap lahan eks LIPI dengan sewa sebesar Rp. 1000.000 per hektar yang dituangkan dalam SK Gubernur Nomer 6/460/B.X/Hk/2012.

4. Peta Konflik Kecamatan Tanjung Sari

Konflik di wilayah ini meskipun masih berupa konflik potensial, disebut konflik lingkungan karena terkait dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan, yaitu (1) pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah pabrik dari PT. Sugar Labinta ke sungai Way Galih, dan (2) kerusakan lingkungan akibat banjir yang dialami oleh warga masyarakat yang bermukim di RT 05, Dusun I dan RT 01 dan RT 02, Dusun II, Desa Kertosari.

4.1 Anatomi dan penyelesaian konflik

PT. Sugar Labinta merupakan salah satu pabrik gula di Kecamatan Tanjung Sari yang membuang limbah olahan gula ke sungai Way Galih. Pembuangan limbah inilah yang menimbulkan protes warga masyarakat.

Pembuangan limbah sejak tahun 2009 ini mengakibatkan aktivitas pengambilan air untuk kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Umbul Kupeng dan Umbul Cilacap terhenti. Bahkan mengakibatkan produktivitas lahan pertanian menurun.

4.2 Isu, bentuk, aktor, dan penyebab konflik

Konflik antara PT. Sugar Labinta dengan masyarakat korban pencemaran masih berupa konflik potensial (*latent*) bukan konflik terbuka (*manifest*). Masyarakat korban pencemaran

masih sebatas menyampaikan keluhan dan tuntutan kepada PT. Sugar Labinta melalui pamong dan tokoh masyarakat setempat. Konflik terjadi sejak tahun 1999 sampai sekarang (2018).

Pihak berkonflik adalah warga masyarakat Umbul Kupeng dan Umbul Cilacap dengan PT. Sugar Labinta. Selain itu juga terdapat satu anggota DPRD Lampung Selatan yang tinggal di Mulyosari yang meredakan keinginan warga untuk berunjukrasa. BPLH sebagai pihak yang mendapatkan laporan pencemaran dan melakukan pengecekan serta pemerintah Desa Kertosari, Desa Mulyosari, dan Kecamatan Tanjung Sari.

Penyebab langsung adalah pembuangan limbah oleh PT Sugar Labinta ke sungai Way Galih, penyebab tidak langsungnya adalah pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah PT. Sugar Labinta tidak melakukan fungsinya secara efektif.

4.3 Dampak pembuangan limbah dan penyelesaian

Munculnya cacing merah di sekitar sungai sehingga masyarakat tidak dapat memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari, sumur warga tercemar, dan terjadi penurunan produktivitas tanaman pertanian.

Saat ini konflik masih berupa konflik potensial, namun berpotensi menimbulkan konflik terbuka. Warga merasa BPLH dan Pemda Lampung Selatan belum optimal mengontrol pencemaran yang terjadi. Masyarakat juga merasa belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai dampak limbah tersebut.

Usaha penyelesaian dilakukan oleh tokoh masyarakat dan pemerintah setempat dengan cara menyampaikan keluhan dan tuntutan masyarakat korban kepada perusahaan (PT. Sugar Labinta). PT Labinta menanggapi keluhan dengan (1) pembuatan sumur bor di beberapa tempat, (2) berjanji akan membuat sumur bor untuk pengairan sawah (1 sumur untuk 10 hektar). Namun penyelesaian ini dirasa belum memadai oleh masyarakat dikarenakan masyarakat tidak memiliki daya untuk melawan PT Sugar Labinta.

4.5 Penanganan pasca konflik

Saat ini konflik masih belum dianggap selesai oleh masyarakat, namun PT Labinta telah memberikan bantuan sumur bor sebanyak 5 unit. BPLH belum melakukan penanganan optimal terhadap konflik potensial ini.

5. Konflik Pembangunan Tanggul

Permasalahan timbul pada awalnya karena kebiasaan banjir di Desa Kertosari dan Desa Umbul Kupeng. Kementerian PU membangun tanggul untuk mengatasi banjir di kedua desa

tersebut. Pembangunan tanggul tidak melibatkan masyarakat, tidak didahului dengan kajian atas dampak dibangunnya tanggul. Akibatnya, banjir yang terjadi di Desa Kertosari malah semakin parah setelah adanya tanggul, namun banjir tidak lagi terjadi di Umbul Kupeng.

5.1 Kronologi kejadian

Tahun 2011 – 2012 kementerian PU membangun tanggul 6 Km pada sisi kiri sungai Way Galih dan sisi kanan sungai Way Tulang Reng di Kecamatan Tanjung Sari untuk mengatasi banjir saat penghujan. Pembangunan hanya dilakukan di sisi Timur sehingga sisi Barat mengalami banjir yang lebih besar.

Dalam setahun (2012) banjir terjadi 4 kali dengan tinggi genangan air mencapai 1-2 meter misalnya pada bulan Februari 2012, masyarakat RT 05, Dusun I dan RT 01, RT 02, Dusun II, Desa Kertosari terendam banjir. Sebanyak 30 rumah terendam di Dusun I dan II. Akibat banjir, sawah seluas 6 hektar terendam dan terjadi gagal panen, ternak hanyut, perabotan rumah tangga rusak. Padi yang sudah dipanen rusak, tanaman palawija seluas 3 hektar mati.

Banjir juga terjadi pada tanggal 23 Januari dan 1 Februari 2013 terjadi banjir lagi di Kertosari, dan sampai saat ini belum ada perbaikan dan pembangunan baru untuk mengatasi banjir di Desa Kertosari. Tahun 2013, masyarakat melalui Seketaris Desa Kertosari membuat proposal pembangunan tanggul baru untuk sisi sebelah barat. Namun, hingga saat ini, tanggulyang diinginkan bekum juga dibangun.

5.2 Anatomi Konflik

Masyarakat RT 05, Dusun I dan RT 01 dan RT 02, Dusun II, Desa Kertosari berada di dataran yang rendah. Setiap musim penghujan mengalami banjir bersama dengan warga Umbul Kupeng namun banjir dapat diatasi karena air tidak tinggi dan malah menyuburkan tanah pertanian.

Tahun 2012 dibangun tanggul oleh Kementerian PU. Karena adanya tanggul tersebut, Umbul Kupeng terbebas dari banjir namun warga RT 05, Dusun I dan RT 01, RT 02, Dusun II terendam banjir sampai setinggi 2 meter.

5.3 Isu, bentuk, aktor, dan penyebab konflik

Konflik yang terjadi masih berupa konflik potensial belum menjadi konflik terbuka. Warga terdampak masih dalam tahap mengeluh dan mengancam saja. Konflik terjadi sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini (2017).

Aktor yang terlibat adalah korban banjir yaitu masyarakat Dusun 1 (RT05) dan Dusun II (Rt 01 dan Rt 02) Desa Kertosari, pemerintah kabupaten Lampung Selatan yang memiliki peran membantu korban banjir dan menyampaikan keluhan korban kepada kementerian PU. BPBD Lampung Selatan membantu masyarakat saat terjadi banjir. Pemerintah Desa Kertosari membantu memfasilitasi masyarakat dalam membuat proposal pembangunan tanggul kepada Kementerian PU dan yang mengkoordinir tanda tangan warga dalam pembuatan proposal tersebut.

Akar masalahnya yang terjadi adalah (1) pembangunan tanggul oleh Kementerian PU yang secara teknis tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat RT 05, Dusun I dan RT 01, RT 02, Dusun II, Desa Kertosari. Kementerian PU melakukan perbaikan atas sebagian tanggul yang menjadi penyebab banjir, tidak memperbaiki bagian lainnya, sehingga air meluap di wilayah yang tanggulnya tidak diperbaiki, dan (2) Tidak adanya respon yang pasti atas banjir yang menggenangi wilayah permukiman warga masyarakat RT 05, Dusun I dan RT 01, RT 02, Dusun II, Desa Kertosari.

5.4 Dampak dan penyelesaian

Konflik terjadi karena pembangunan tanggul yang tidak partisipatif. Banjir yang terjadi mengakibatkan kerugian besar baik materi maupun non materi. Tahun 2012 terjadi 4 kali banjir setinggi 1-2 meter, mengakibatkan 30 rumah terendam, sawah seluas 6 hektar terendam dan gagal panen dan 3 hektar tanaman palawija mati.

Warga sangat kecewa dengan kementerian PU. Pada tahun 2013 dilakukan perbaikan di sisi kiri tanggul sehingga mengakibatkan kecemasan warga di sisi kanan tanggul akan terjadinya banjir yang lebih besar.

Sampai saat ini keluhan dan ketidakpuasan masyarakat masih berlangsung, namun upaya yang dilakukan adalah (1) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memberikan bantuan masyarakat korban banjir. Bantuan yang diberikan berupa beras 7 Kg dan mie instan beberapa bungkus, (2) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui BPBD berjanji akan membangun tanggul, dan (3) Masyarakat dengan difasilitasi Sekretaris Desa Kertosari mengajukan proposal atau mengajukan usulan pembangunan tanggul kepada Kementerian PU.

PEMBAHASAN

Analisis Konflik Sosial di Lampung Selatan

Bervariasinya konflik sosial di Kabupaten Lampung Selatan, meskipun belum seluruhnya, merupakan protret atau prototipe dari berbagai kasus konflik sosial di Provinsi Lampung.

1. Anatomi Konflik

Konflik sosial yang terjadi bersifat potensial atau terpendam (*latent*) dan terbuka (*manifest*) serta konflik realistik maupun non realistik. Untuk membangun sistem deteksi dini, dilakukan pemahaman terhadap konflik-konflik yang sudah terjadi sebelumnya.

Tabel 1. Anatomi Konflik Sosial di Kabupaten Lampung Selatan

| Nama Konflik | Lokasi | Sumber | Isu | Posisi | Bentuk |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|
| Way Panji | Balinuraga | Psikososial | Pelecehan Seksual | Horizontal | Kekerasan |
| Natar | Merak Batin | Nilai-nilai | Agama | Horizontal | Kekerasan |
| Jati Agung | Eks Lahan LIPI | Struktural | Agraria | Vertikal | Terbuka |
| Tanjung Sari | Kertosari, Mulyosari | Kepentingan | Lingkungan | Vertikal | Potensial |
| | Kertosari | Struktural | Lingkungan | Vertikal | Potensial |

Sumber: Diolah dari Data Primer, 2017

Tabel 1. menunjukkan bahwa taksonomi konflik sosial berdasarkan sumbernya, terdapat konflik berdasarkan faktor psikososial, nilai-nilai, struktur, dan kepentingan ekonomi.

a. Konflik Way Panji

Berdasarkan faktor psikososial, bersumber dari emosi negatif yang kuat, salah persepsi, dan salah komunikasi. Emosi yang kuat dilandasi oleh rasa benci, dendam, tidak senang, dan sebagainya yang diekspresikan dalam bentuk marah.

b. Konflik Jati Agung

Konflik ini merupakan konflik struktural karena adanya kesenjangan akses dan partisipasi masyarakat lokal terhadap penguasaan sumber-sumber agraria. Konflik pertanahan merupakan konflik yang paling sering terjadi di semua wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Jika dilihat dalam kerangka struktural, perkembangan Lampung Selatan membawa dampak semakin tingginya kebutuhan akan lahan, hal tersebut mempengaruhi nilai tanah dan situasi ini rentan terhadap munculnya beragam konflik pertanahan. Konflik pertanahan yang terjadi pada umumnya akumulatif dan bersinggungan dengan dimensi lain yaitu dengan dimensi politik, ekonomi, etnik, agama, dan segregasi sosial.

Konflik terjadi karena sistem koordinasi antar stakeholders belum menunjukkan komitmennya yang kuat dalam menyelesaikan masalah, adanya kesenjangan ekonomi antara sebuah perusahaan dengan masyarakat sekitar dan kurang pedulinya perusahaan terhadap kondisi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat lokal.

c. Konflik Tanjung Sari

Konflik ini bersumber dari faktor kepentingan dan juga faktor struktural. Jenis konflik seperti ini terutama terjadi di dalam ruang politik dan ruang ekonomi. Faktor ekonomi menjadi penting sebagai sumber konflik sosial ketika terjadi kesenjangan, baik secara obyektif (*absolute*) maupun relatif. Faktor ini yang paling banyak terjadi, terutama yang berhubungan dengan penguasaan sumber-sumber agraria, khususnya tanah.

Dilihat dari struktur konflik, maka konflik vertikal lebih banyak dibanding konflik horizontal, sedangkan konflik vertikal lebih banyak terjadi antara masyarakat dengan perusahaan dibanding dengan pemerintah. Konflik horizontal relatif lebih cepat dapat diselesaikan dibanding konflik vertikal, dan konflik vertikal juga banyak yang berlangsung berkepanjangan, terutama pada konflik-konflik antara masyarakat sekitar dengan perusahaan "didukung" oleh pemerintah.

d. Konflik Natar

Konflik ini terjadi karena perbedaan nilai yang diyakinin satu kelompok dengan kelompok lainnya. Tidak adanya toleransi terhadap kelompok lain dan adanya kehidupan yang eksklusif.

Terjadi klaim kebenaran nilai yang akan menjadi lebih rumit jika bergesekan dengan faktor lain seperti etnik, ekonomi, dan politik. Klaim kebenaran dapat menimbulkan aliran keagamaan yang mengabaikan eksistensi teologi lain dan kurang memperhatikan pandangan inklusif dan pluralis.

Berdasarkan anatomi konflik sumber utama konflik terbuka masih didominasi oleh faktor sosial-ekonomi, baik langsung maupun tidak langsung, baik secara obyektif maupun subyektif (*relative deprivation*), sehingga faktor sosial-ekonomi berposisi sebagai infrastruktur konflik. Faktor fanatisme nilai-nilai budaya dan agama tanpa ada titik temu, dapat dipandang sebagai faktor komplementer yang dapat menambah semakin kerasnya tindakan para aktor konflik. Dapat dimengerti bahwa faktor komplementer tersebut, dalam beberapa kasus, dapat menjadi sumber konflik.

2. Penanganan Pasca Konflik

Penanganan konflik sosial (*social conflict management*) yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan dapat dibagi menjadi tiga kategori. Ketiga kategori tersebut sekaligus menunjukkan tingkatan atau tahapan, yaitu mekanisme penyelesaian secara sosiokultural, tradisional, dan rasional.

Secara sosiokultural lebih tertuju pada upaya pencegahan konflik potensial agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka. Mekanisme tradisional dan rasional termasuk dalam penyelesaian konflik yang sudah terjadi sejak konflik di permukaan (*emerging conflict*) sampai dengan konflik terbuka (*manifest conflict*) dan konflik kekerasan (*violence conflict*).

Penanganan konflik sosial melalui mekanisme sosiokultural, baik dalam mencegah konflik potensial berkembang menjadi konflik terbuka maupun dalam memulihkan kondisi pasca konflik (pasca perdamaian) masih kurang ditangani secara tuntas di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem deteksi dini (*early warning systems*) yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan para pihak yang berwenang, masih lemah. Konflik yang telah didamaikan belum tentu berarti selesai, di antara pihak yang berkonflik masih memiliki perasaan negatif satu sama lain. Dalam beberapa kasus konflik sosial yang terjadi berdasarkan faktor psikososial, kepentingan, nilai-nilai dan struktur adalah termasuk konflik berlanjut. Sebagian kasus konflik sosial yang muncul saat ini merupakan kelanjutan dari konflik-konflik yang terjadi sebelumnya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Konflik sosial disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang implementasinya mengabaikan keberadaan dan kepentingan masyarakat lokal yang majemuk. Mekanisme penanganan konflik kurang melihat faktor-faktor penyebabnya secara mendasar sehingga dapat menyebabkan timbulnya konflik-konflik sosial secara berkelanjutan.
2. Konflik potensial dan konflik terbuka muncul paling tidak bersumber dari empat faktor, yaitu berbasis pada hubungan psikososial, kepentingan ekonomi, perbedaan nilai-nilai (agama, kepercayaan, etnisitas), dan struktural.
3. Faktor ekonomi berposisi sebagai infrastruktur konflik, yang terjadi dalam bentuk ketimpangan hubungan sosial dan ketimpangan akses ruang usaha dan penguasaan sumber-sumber ekonomi dan ketimpangan struktural. Faktor perbedaan nilai-nilai (agama,

kepercayaan, dan etnik) dan kepentingan politik berposisi sebagai faktor pendukung konflik.

4. Faktor pemicu konflik berawal dari konflik antar individu atau antar kelompok kecil, kemudian berkembang menjadi konflik antar kelompok yang lebih besar dan juga dapat berawal dari konflik antar individu kemudian berkembang menjadi konflik antar kelompok. Kualitas persoalan yang dihadapi, konflik antar kelompok dapat dipicu dari persoalan yang sederhana, tidak realistik dan tidak menarik, sampai pada persoalan yang realistik dan mendasar.
5. Penanganan konflik sosial mengedepankan asas musyawarah dan mufakat melalui mediasi. Penanganannya lebih terkonsentrasi pada upaya penyelesaian konflik terbuka, dibandingkan dengan upaya mencegah dan melakukan tindakan-tindakan responsif secara dini.

Rekomendasi

Dalam rangka pembangunan infrastruktur, maka perlu dipertimbangkan beberapa usulan berikut:

1. Perencanaan sosial juga berarti memberi kompensasi atas kerugian-kerugian sosial dan mengatasnamakan manfaat bagi manusia dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, dalam rangka memperhatikan aspek-aspek sosial, maka perlu meningkatkan kualitas perencanaan sosial yang mengedepankan model pembangunan partisipatif.
2. Memperhatikan kekuatan kelembagaan sosial dapat sangat berguna, *pertama*, dalam menciptakan kesadaran hidup bersama pada lingkungan multikultural (majemuk), dan *kedua*, dapat meningkatkan loyalitas lintas kelompok, sekaligus melemahkan fanatisme sempit terhadap keberadaan kelompoknya.
3. Perlu dikembangkan sistem deteksi dini (*early warning system*) dan sistem respon dini (*early respon system*) masyarakat guna untuk mencegah berkembangnya konflik potensial menjadi konflik terbuka, dalam bentuk konflik-konflik kekerasan.

BAHAN BACAAN

Brown, Rupert. 2005. *Prejudice: Menangani "Prasangka" dari Perspektif Psikologi Sosial*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Prenada Media Group: Jakarta, 2007.

- Burhanuddin, Jajat dan Subhan, Arief (Editor), 1999, *Sistem Siaga Dini Untuk Kerusuhan Sosial*, Jakarta: Balitbang Agama Depag RI dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) IAIN Jakarta.
- Davies, John L. dan Gurr, Robert. 1998. *Preventive Measures: Building Risk Assessment and Crisis Early Warning Systems*. New York: Rowman and Littlefield Publishers, Inc.
- Effendi, Sofian, dkk., 1992, *Telaah Pengelolaan Keresasian Sosial dari Literatur Luar Negeri dan Hasil-Hasil Penelitian Indonesia*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.
- Hermansyah, 2009, *Penyelesaian Konflik Etnis dan Institutionalisasi Pengadilan Lokal yang Berbasis Budaya*, Yogyakarta. Jurnal Media Hukum, Volume 16 No. 3 Desember 2009.
- John W. Creswell. 1994. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. SAGE Publications, Inc. Thousand Oaks, California.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung. 2011. *Analisis Konflik Antar kelompok dan Upaya Menciptakan Sistem Siaga Dini Dalam Masyarakat Majemuk di Provinsi Lampung*. Bandar Lampung.
- Malik, Ichsan; Wijarjo, Boedhi, Fauzi Noer, dan Royo, Antoinette. 2003. *Menyeimbangkan Kekuatan: Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam*. Jakarta: Yayasan Kemala.
- Miall, Hugh, dkk. 2000. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pelly, Usman. 1993. *Pengukuran Intensitas Potensi konflik Dalam Masyarakat Majemuk*. Jakarta: Analisa CSIS, Tahun XXII, No.3, Mei-Juni 1993.



Landasan filosofis dan yuridis tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sudah mengalami 4 (empat) kali amandemen. Aturan-aturan hukum pun banyak yang sudah mengalami perubahan dan pembaharuan. Situasi kemasyarakatan kita, juga makin terbuka dan semua elemen masyarakat makin mampu mengekspresikan tuntutan dan kritiknya baik secara verbal maupun melalui media massa. Nilai dan norma sosial juga mengalami pergeseran yang luar biasa. Pranata dan lembaga sosial pun mengalami perubahan orientasi, termasuk pranata keluarga. Internalisasi nilai dalam keluarga melalui pola ajar dan pola tindak, juga tidak sepenuhnya lagi menjadi otoritas orang tua. Bahkan cenderung lingkungan eksternal lebih dominan pengaruhnya dibanding lingkungan keluarga. Dan masih sangat banyak perspektif sosiologis yang bisa dikaji dan didiskusikan baik dalam konteks politik, hukum, ekonomi, budaya, agama, internasional dan lain-lain.

Hal ini semua tentu menjadi gambaran yang menarik dari sebuah lukisan perjalanan reformasi Indonesia yang sudah mencapai usia 20 tahun. ISI sebagai wadah berhimpunnya para akademisi dan peminat sosiologi, juga tentu mempunyai catatan-catatan penting dalam mengamati dan merefleksikan 20 tahun reformasi di Indonesia. Namun kita semua menyadari, bahwa mengamati perkembangan Indonesia saat ini juga tidak dilepaskan dari perkembangan dunia dalam semua perspektif. Berangkat dari latar belakang ini, dalam Kongres ISI Tahun 2018



DEPARTEMEN SOSIOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Bekerjasama
dengan



IKATAN SOSIOLOGI INDONESIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

**PENERBIT DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FISIP UNIVERSITAS HASANUDDIN**

FIS VIII LL | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kampus Universitas Hasanuddin Tamalene
Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10, Kota Makassar, 90425
Telp. +62411-596200 Fax +62411-595188

ISBN 978-602-32983-1-0

